

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi
Visi Walikota
Misi Walikota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasuruan Kota Madinah "Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya"

1. Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan
2. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tanggung serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata
4. Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif

Tugas
Fungsi

- Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- a. Penyusunan perencanaan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
 - d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - h. pembinaan terhadap UPT

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI	FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk dari indikator indeks kualitas jalan, indeks layanan drainase dan indeks penataan ruang	$(50\% \times \text{indeks kualitas jalan}) + (40\% \times \text{indeks layanan drainase}) + (10\% \times \text{Indeks Penataan Ruang})$	77,81%	81,9%	1. Jalan dan bangunan pelengkap Kondisi Mantab 2. Jembatan Kondisi Mantab 3. Irigasi Kondisi Baik 4. Drainase Kondisi Baik 5. Kesesuaian pemanfaatan ruang 6. Dokumen ketataruangan yang disusun	BIDANG BINA MARGA, BIDANG TATA RUANG, BIDANG ENATAAN BANGUNAN DAN BINA KONSTRUKSI, BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	Indeks Kualitas Jalan dibentuk dari indikator persentase jalan kota dan bangunan pelengkapny dalam kondisi baik dan sedang serta indikator persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	$(70\% \times \% \text{Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapny dalam Kondisi Baik dan Sedang}) + (30\% \times \% \text{jembatan dalam kondisi baik dan sedang})$	76,62%	79,32%	1. Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/237/423.011/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/182/423.011/2018 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Pasuruan	BIDANG BINA MARGA	
	Indeks Layanan Drainase	Indeks Layanan Drainase dibentuk dari persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik serta persentase drainase dalam kondisi baik. Indeks layanan drainase memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan drainase	$\frac{\% \text{Irigasi Kondisi Baik} + \% \text{Drainase Kondisi Baik}}{2}$	79,01%	82,78%	1. Hasil Survey Kondisi Jaringan Irigasi dan Drainase tiap tahun 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 tentang Penetapan Status Jaringan Irigasi Sumber Daya Air dan Drainase	BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	
	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dibentuk dari jumlah Gedung negara dalam kondisi baik dan jumlah Gedung negara yang dibutuhkan. Indeks kualitas bangunan Gedung negara memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan Gedung negara	$\frac{\sum \text{Gedung Negara dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Gedung Negara yang Dibutuhkan}} \times 100$	64,90%	65,35%	1. Survey jumlah gedung negara yang dibutuhkan pada tahun 2020 ditambah proyeksi kebutuhan gedung negara 2. Survey kondisi gedung negara tiap tahun	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA KONSTRUKSI	Target 2024 berubah tidak sesuai dengan RENSTRA dikarenakan capaian 2023 telah melibi target 2024 pada RENSTRA

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI	FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
	Indeks Penataan Ruang	Indeks Penataan Ruang dibentuk dari persentase Kawasan yang mempunyai rencana detail dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Indeks penataan ruang memudahkan pemerintah untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW serta berapa jumlah rencana detail yang dimiliki oleh Kota Pasuruan	$(70\% \times \%Kesesuaian\ Pemanfaatan\ Ruang\ dengan\ Tata\ Ruang) + (30\% \times \%Kawasan\ yang\ Mempunyai\ Rencana\ Detail)$	76,96%	84,55%	1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasuruan Tahun 2021 - 2041 2. Jumlah Dokumen Ketataruangan yang disusun selama tahun 2022-2026	BIDANG TATA RUANG	
Sasaran 2: Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Merupakan Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	78,01	78,3	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Kota Pasuruan	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
	Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Persentase Temuan Hasil pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yang di tindaklanjuti yang dibandingkan dengan total temuan APEP dan APIP tahun berjalan	$\frac{\sum \text{Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan APEP tahun berjalan yang ditindak lanjuti} + \text{Jumlah temuan hasil pengawasan tahun berjalan yang di TL}}{\sum \text{Jumlah Temuan Hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan} + \text{Jumlah Temuan hasil pengawas APIP tahun berjalan}} \times 100$	100%	100%	Tanggapan temuan BPK	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN



GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670824 199803 1 005